**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Arumbai**
**Published by: Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Pattimura**
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2025 (275-286)
e-ISSN: 3026-2151
Journal homepage: https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/arumbai

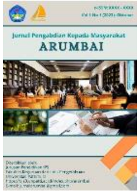

# Model Pendampingan Adaptif dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Kepulauan di SMP Negeri 15 Ambon

*Adaptive Mentoring Model in the Implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) at Island-Based Schools in SMP Negeri 15 Ambon*

**Sumarni Rumfot[1*], Desembra Sohilait[1], Adha Untayana[1]**
[1]Program Studi Pendidikan Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Pattimura

***Correspondence Address:** E-mail: rumfot.sumarni@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.30598/arumbai.vol3.iss2.pp275-286

**Article Info**
**Article history:**
Received: 09-05-2025
Revised: 03-06-2025
Accepted: 20-07-2025
Published: 30-08-2025

## ABSTRAK

Pengabdian ini berangkat dari pentingnya penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai fondasi peningkatan mutu pendidikan di sekolah, khususnya pada konteks kepulauan seperti Pulau Ambon yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan akses pembinaan. Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas guru dan kepala sekolah dalam memahami, menerapkan, serta mengembangkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara mandiri dan berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan pada 5 SMP Negeri selama 6 bulan dengan 45 peserta yang terdiri atas guru dan kepala sekolah. Metode yang digunakan berupa pelatihan partisipatif, pendampingan teknis, dan evaluasi kolaboratif antara perguruan tinggi, sekolah, dan pemerintah daerah. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman, keterampilan manajerial mutu, dan terbentuknya budaya mutu di sekolah. Pengabdian ini menghasilkan model pendampingan adaptif berbasis kolaborasi lokal yang efektif untuk konteks kepulauan. Rekomendasi diarahkan pada penguatan kebijakan pendampingan berkelanjutan dan integrasi sistem mutu berbasis digital.

Kata kunci: SPMI, pendampingan, budaya mutu

## *ABSTRACT*

*This community service initiative stems from the need to implement an Internal Quality Assurance System (SPMI) as a foundation for educational quality improvement, particularly in island regions such as Ambon with limited resources and supervision access. The program aimed to enhance teachers' and principals' capacities in understanding, applying, and developing the PPEPP cycle (Establishment, Implementation, Evaluation, Control, and Improvement) independently and sustainably. The activity was conducted in five public junior high schools over six months, involving 45 participants comprising teachers and principals. The method involved participatory training, technical mentoring, and collaborative evaluation between universities, schools, and local government. Results indicated significant improvement in quality management competence and the establishment of a strong quality culture. This activity developed an adaptive mentoring model grounded in local collaboration, effective for island-based schools. The recommendation emphasizes continuous mentoring policy and integration of digital-based quality systems.*

*Keywords: SPMI, mentoring, quality culture*

**To cite this article:** Rumfot, S., Sohilait, D., & Untayana, A. (2025). Model Pendampingan Adaptif dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Kepulauan di SMP Negeri 15 Ambon. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Arumbai*. 3(2), 275-286. https://doi.org/10.30598/arumbai.vol3.iss2.pp275-286

**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan persaingan mutu pendidikan yang makin ketat, keberlangsungan kualitas pendidikan perlu didukung dengan mekanisme pengendalian internal yang kuat di setiap satuan pendidikan. Pendidikan menengah pertama (SMP) sebagai jenjang penting dalam mempersiapkan kompetensi peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21 wajib mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) secara konsisten. Penjaminan mutu internal dimaknai sebagai usaha sistematik untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu berdasarkan standar yang ditetapkan sendiri oleh sekolah (cycle PPEPP). Beberapa studi menunjukkan bahwa ketika sekolah melaksanakan SPMI dengan siklus manajemen mutu secara berkelanjutan, hasil belajar dan kepuasan pemangku kepentingan mengalami peningkatan signifikan (Rambe 2025; Rahminawati 2023; Harahap et al. 2023; Sukmawati & Rahminawati 2023). Selain itu, SPMI yang diiringi dengan budaya mutu dan dokumentasi yang baik memungkinkan sekolah merespon cepat dinamika perubahan dan tuntutan mutu eksternal (Meirani et al. 2022; Jamil & Hasbi 2023; Lubis & Siregar 2022). Oleh sebab itu, pendampingan implementasi SPMI di SMP Negeri di Pulau Ambon menjadi sangat relevan sebagai upaya memperkuat kapasitas internal sekolah dan menanamkan budaya mutu secara menyeluruh.

Kondisi umum di banyak sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi SPMI belum optimal, terutama di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan sumber daya terbatas. Di sejumlah SMP, dokumen mutu (kebijakan, standar, prosedur, formulir) belum terstruktur dan belum menjadi acuan nyata dalam aktivitas sekolah sehari-hari. Pada aspek evaluasi dan audit mutu internal, rata-rata sekolah belum rutin melakukan refleksi dan tindak lanjut perbaikan berbasis data. Hidayah & Syahrani (2022) menyebut bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan internal harus dibekali pendampingan agar standar mutu dapat diaktualisasikan dalam praktik. Sementara itu, literatur lain menegaskan bahwa sekolah yang mendapat pendampingan SPMI mencatat perbaikan tata kelola, keterlibatan staf, serta kohesi tim mutu (Suharyanti 2024; Rohmayanti 2024; Ismail & Nur 2024). Di kota Ambon khususnya, sejumlah SMP Negeri belum memiliki rekam jejak kuat pendampingan sistem mutu; hal ini memperjelas urgensi intervensi kapasitas dan fasilitasi untuk memperkuat implementasi SPMI di konteks lokal.

Secara khusus, sekolah di Pulau Ambon menghadapi karakteristik kontekstual: kondisi kepulauan menyebabkan kesulitan logistik dan akses pendampingan berkelanjutan serta disparitas kualitas antar kecamatan. Banyak SMP Negeri di Ambon belum memiliki tim penjamin mutu atau belum mengoperasikan siklus evaluasi dan tindak lanjut secara sistematis. Di daerah kepulauan, kendala sumber daya manusia, kurangnya pemahaman staf terhadap siklus mutu, serta lemahnya dokumentasi turut menjadi hambatan utama (Rambe 2025; Jannah 2024; Nugraha & Fitriani 2025). Selain itu, budaya kerja yang belum menginternalisasi budaya mutu dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan nyata dalam internalisasi SPMI dalam praktik sekolah sehari-hari (Harahap & Siregar 2021; Aini & Puspitasari 2023). Oleh karena itu, pendampingan perlu dirancang responsif terhadap karakteristik sekolah kepulauan dan kondisi internal sekolah di Ambon agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan dengan stabil dan berkelanjutan. Namun hingga saat ini belum ada model pendampingan adaptif yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah kepulauan di Ambon, padahal konteks lokal dan hambatan geografis menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan kolaboratif.

Fokus pendampingan diarahkan agar SMP Negeri di Ambon mampu menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) secara mandiri dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Intervensi meliputi fasilitasi penyusunan kebijakan mutu, pengembangan standar internal, audit mutu internal, serta pelatihan penyusunan instrumen evaluasi dan dokumentasi mutu. Studi tentang pelaksanaan SPMI di sekolah menengah menunjukkan bahwa intervensi semacam itu memerlukan dukungan intensif dan monitoring berkala agar tidak berhenti pada dokumen semata melainkan menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari (Jannah 2024; Kurniawan & Susanti 2023; Rambe 2025). Pada penelitian di MAN 2 Medan misalnya, pelaksanaan SPMI yang efektif melalui siklus PPEPP menghasilkan transformasi institusional dan budaya kolaboratif (Rambe 2025; Meirani et al. 2022). Pendampingan yang dilaksanakan selama waktu tertentu dengan kunjungan berkala sangat krusial agar transfer pengetahuan dan adopsi praktik mutu dapat terjaga.

Dalam rangka menguatkan pendidikan di Ambon, pengabdian masyarakat melalui pendampingan SPMI akan menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis sekolah. Beberapa pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa intervensi berbasis pendampingan di sekolah memperkuat efektivitas penjaminan mutu internal. Misalnya, Harahap et al. (2023) menyebut pendampingan SPMI sekolah mampu meningkatkan kinerja dokumentasi dan audit mutu; Suharyanti (2024) menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang mendampingi prodi berhasil mempercepat kapasitas mutu; Rahminawati (2023) melaporkan bahwa pendampingan di sekolah dasar memperkuat siklus evaluasi dan peningkatan; Meirani et al. (2022) menemukan fasilitasi berkelanjutan memperkuat komitmen mutu; Rohmayanti (2024) mencatat bahwa pendampingan sistematik meningkatkan koordinasi tim mutu; Kurniawan & Susanti (2023) menegaskan bahwa model berbasis PPEPP mendorong peningkatan tata kelola; sedangkan Nugraha & Fitriani (2025) menyoroti efektivitas digitalisasi sistem mutu dalam konteks sekolah terpencil. Dengan mengintegrasikan pengalaman pengabdian tersebut, pendampingan di SMP Negeri Ambon diharapkan menerapkan praktik terbaik dan adaptasi kontekstual.

Tujuan dari pengabdian ini adalah meningkatkan kapasitas SMP Negeri di Pulau Ambon dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten melalui pendampingan teknis dan monitoring berkala. Selain itu, *novelty* yang diusulkan terletak pada pendekatan lokal-kepulauan yang mengintegrasikan adaptasi logistik, pendampingan berbasis digital dan tatap muka, serta penyesuaian terhadap karakteristik budaya pendidikan di Ambon. Dengan begitu, diharapkan muncul model pendampingan SPMI yang efektif untuk konteks kepulauan serta terbentuk sekolah yang berbudaya mutu secara mandiri.

## METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan sekolah, di mana dosen pendamping dan tim mutu sekolah berkolaborasi dalam setiap tahap kegiatan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kegiatan relevan dengan konteks dan kapasitas sekolah sasaran, yaitu SMP Negeri 15 Ambon. Model kegiatan disusun berdasarkan analisis kesenjangan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan difokuskan pada penguatan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Strategi ini dipilih untuk memfasilitasi proses transformasi budaya mutu dari aspek administratif menuju implementasi yang operasional di lingkungan sekolah. Pendekatan ini efektif untuk meningkatkan kepemilikan sekolah terhadap sistem mutu yang dibangun bersama mitra akademik (Harahap et al., 2023).

Tahapan kegiatan terdiri atas persiapan, pelaksanaan, pendampingan intensif, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Ambon untuk menentukan sekolah sasaran dan menandatangani nota kesepahaman. Selanjutnya dilakukan analisis awal kondisi sistem mutu di sekolah, termasuk identifikasi dokumen mutu, sumber daya manusia, dan mekanisme evaluasi internal yang telah ada. Hasil analisis digunakan untuk merancang modul pelatihan dan pendampingan sesuai kebutuhan tiap sekolah. Kegiatan dilaksanakan selama enam bulan pada lima SMP Negeri dengan total 45 peserta yang terdiri atas guru, kepala sekolah, dan staf administrasi. Kegiatan pelaksanaan mencakup pelatihan teknis, pembimbingan penyusunan dokumen mutu, serta simulasi audit internal. Tahap pendampingan dilakukan secara tatap muka dan daring untuk memastikan kesinambungan implementasi SPMI serta transfer pengetahuan yang berkelanjutan (Rambe, 2025).

Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode pelatihan partisipatif (*participatory training*), di mana guru, kepala sekolah, dan staf administrasi dilibatkan sebagai peserta aktif. Setiap sesi disusun dengan model pembelajaran orang dewasa (*andragogi*), agar peserta dapat langsung menerapkan hasil pelatihan dalam konteks kerja nyata. Fasilitator dari perguruan tinggi berperan sebagai mitra pendamping yang menyediakan bimbingan teknis, materi pembelajaran, dan supervisi proses implementasi. Evaluasi kuantitatif dilakukan melalui instrumen pretest dan posttest untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep SPMI, sedangkan evaluasi kualitatif dilakukan melalui refleksi bersama di akhir setiap sesi menggunakan skala penilaian kompetensi dan lembar observasi perilaku profesional peserta. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan terciptanya kesamaan persepsi antara tim sekolah dan tim pendamping dalam memahami tujuan peningkatan mutu pendidikan (Jannah, 2024).

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan pendampingan. Pemantauan dilaksanakan secara berkala melalui kunjungan lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen sekolah. Instrumen monitoring meliputi indikator keberhasilan seperti kelengkapan dokumen SPMI, pelaksanaan siklus PPEPP, serta peningkatan kemampuan tim mutu sekolah. Evaluasi dilakukan dua kali, yaitu evaluasi formatif saat proses pendampingan dan evaluasi sumatif setelah seluruh kegiatan selesai. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui triangulasi observasi, wawancara, dan analisis dokumen mutu sekolah, sedangkan hasil pretest dan posttest dianalisis secara komparatif untuk melihat peningkatan capaian kompetensi peserta. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan program pendampingan tahap berikutnya. Kegiatan monitoring juga mencakup aspek keberlanjutan program agar sekolah dapat melanjutkan siklus mutu secara mandiri. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya menghasilkan produk administratif, tetapi juga mengubah budaya kerja menuju budaya mutu yang berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kemandirian sekolah. Model pendampingan dikembangkan agar setelah program selesai, sekolah memiliki kapasitas menjalankan sistem penjaminan mutu secara otonom. Hasil dari kegiatan diharapkan menjadi model replikasi bagi sekolah lain di wilayah kepulauan dengan karakteristik serupa. Selain itu, kegiatan ini juga memberi kontribusi terhadap peningkatan kapasitas dosen dalam pengembangan model pendampingan berbasis *evidence* dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan perguruan tinggi sebagai agen penggerak peningkatan mutu pendidikan sekaligus sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan mutu pendidikan di wilayah kepulauan seperti Ambon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Pengabdian Masyarakat

### 1. Implementasi Pendampingan SPMI di SMP Negeri Pulau Ambon

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di SMP Negeri Pulau Ambon diawali dengan kegiatan koordinasi bersama Dinas Pendidikan Kota Ambon dan para kepala sekolah sebagai mitra utama. Tahapan ini bertujuan menyamakan persepsi tentang pentingnya sistem penjaminan mutu internal sebagai alat untuk menjamin keberlanjutan kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Tim pelaksana pengabdian melakukan asesmen awal terhadap kondisi dokumen mutu dan pemahaman staf sekolah terkait siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Hasil asesmen memperlihatkan bahwa sebagian besar sekolah telah mengenal istilah SPMI namun penerapannya belum terstruktur. Banyak dokumen mutu disusun karena kebutuhan akreditasi, bukan karena kesadaran terhadap budaya mutu. Temuan awal ini menjadi dasar penting bagi tim untuk menentukan pola pendampingan yang partisipatif, dengan prinsip belajar bersama dan berbagi pengalaman antar sekolah. Melalui tahapan awal ini, terbentuk komitmen bersama bahwa SPMI bukan sekadar kelengkapan administratif, tetapi pondasi manajemen mutu berkelanjutan.

Kegiatan selanjutnya berfokus pada pelatihan teknis dan pendampingan langsung dalam penyusunan dokumen mutu sekolah. Setiap sekolah mitra difasilitasi untuk membentuk tim penjaminan mutu internal yang terdiri dari kepala sekolah, guru senior, dan staf tata usaha. Tim ini didampingi untuk menelaah kembali visi, misi, dan tujuan sekolah agar selaras dengan standar nasional pendidikan serta konteks lokal Ambon. Proses pelatihan dilakukan dengan metode partisipatif, di mana peserta diajak mendiskusikan pengalaman lapangan dalam mengelola pembelajaran dan administrasi mutu. Tim pengabdian memberikan contoh format dokumen mutu yang aplikatif dan memandu peserta menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Pendampingan dilakukan secara bertahap melalui tatap muka dan daring, disertai umpan balik dari fasilitator universitas. Proses ini berhasil menciptakan ruang belajar reflektif yang menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjalankan siklus PPEPP secara mandiri.

Evaluasi kegiatan tahap pertama menunjukkan perubahan signifikan dalam cara sekolah memandang mutu. Sebelum kegiatan, kebanyakan guru menganggap mutu sebatas hasil nilai ujian dan akreditasi; setelah kegiatan, mereka mulai memahami mutu sebagai proses yang berkelanjutan dan dapat diukur melalui indikator kinerja internal. Berdasarkan hasil pretest dan posttest, rata-rata skor pemahaman peserta terhadap konsep SPMI meningkat dari 64,2 menjadi 87,5 (kenaikan 23,3 poin atau 36,2%). Beberapa sekolah bahkan memprakarsai pertemuan rutin untuk membahas tindak lanjut hasil audit mutu internal. Transformasi ini menjadi capaian penting karena menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari kepatuhan administratif menuju tanggung jawab profesional. Pendampingan intensif juga meningkatkan rasa percaya diri guru dan kepala sekolah dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan mutu. Secara keseluruhan, tahap awal pengabdian menghasilkan perubahan budaya kerja dan memperkuat dasar kelembagaan mutu di SMP Negeri Pulau Ambon.

Kegiatan pendampingan berlanjut dengan pelibatan aktif peserta dalam simulasi pelaksanaan siklus PPEPP. Setiap sekolah diminta menyiapkan satu standar mutu prioritas yang akan diimplementasikan sebagai model uji coba. Standar yang paling sering dipilih adalah standar proses dan standar penilaian, karena keduanya berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran harian. Melalui simulasi ini, peserta belajar menetapkan indikator mutu, menentukan instrumen evaluasi, serta menginterpretasikan hasil evaluasi untuk perbaikan. Pendekatan ini menjadikan guru bukan sekadar pelaksana kebijakan, tetapi juga analis mutu yang memahami hubungan antara standar, pelaksanaan, dan hasil. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 80% sekolah mitra berhasil melaksanakan siklus PPEPP lengkap minimal untuk satu standar mutu. Proses pendampingan ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan SPMI di sekolah.

### 2. Penguatan Kapasitas Guru dan Kepala Sekolah dalam Siklus PPEPP

Kegiatan penguatan kapasitas dilaksanakan setelah sekolah memiliki pemahaman dasar tentang sistem SPMI. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan guru dan kepala sekolah dalam menerapkan setiap tahap PPEPP secara konsisten. Tim pengabdian menyusun modul pelatihan berbasis praktik yang meliputi perencanaan mutu, pelaksanaan program, dan evaluasi berbasis data. Guru diajak untuk mengidentifikasi permasalahan mutu di kelas, seperti ketidaksesuaian antara rencana pembelajaran dan pelaksanaan, atau kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. Kepala sekolah dilatih mengelola supervisi akademik berbasis mutu dan mengembangkan sistem umpan balik yang efektif. Seluruh kegiatan dilakukan dengan prinsip kolaboratif dan reflektif agar peserta memahami bahwa siklus PPEPP bukan proses birokratis melainkan strategi pembelajaran organisasi. Melalui diskusi kelompok, peserta berbagi pengalaman dan mencari solusi inovatif terhadap kendala yang dihadapi dalam penerapan SPMI di sekolah.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan guru dalam mengidentifikasi dan merumuskan indikator mutu pembelajaran. Sebelum pelatihan, sebagian besar guru belum terbiasa menyusun indikator terukur yang dapat dievaluasi secara periodik. Setelah mengikuti pelatihan, mereka mampu membuat rancangan evaluasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil kuantitatif dari skor rata-rata kemampuan penyusunan indikator mutu guru meningkat dari 61,8 menjadi 85,7. Kepala sekolah juga menunjukkan peningkatan kompetensi dalam memantau dan menganalisis hasil supervisi akademik dengan skor refleksi diri yang meningkat dari 68 menjadi 90.

Pendekatan mentoring yang digunakan dalam pengabdian terbukti efektif karena memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar melalui praktik langsung. Evaluasi menggunakan instrumen refleksi diri menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta merasa lebih percaya diri dalam mengelola mutu pendidikan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa strategi pendampingan berbasis praktik dan kolaborasi mampu memperkuat kompetensi profesional pendidik dalam konteks mutu berkelanjutan.

Kegiatan penguatan kapasitas tidak berhenti pada pelatihan formal, melainkan dilanjutkan dengan pembimbingan lapangan. Setiap sekolah mitra dikunjungi untuk memastikan penerapan hasil pelatihan dalam kegiatan nyata. Guru diminta menunjukkan bukti praktik pembelajaran yang mencerminkan penerapan standar mutu, sementara kepala sekolah diminta mempresentasikan mekanisme monitoring internal. Pendamping dari universitas memberikan umpan balik terhadap setiap laporan dan membantu sekolah memperbaiki kelemahan sistem yang ditemukan. Data observasi menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap siklus PPEPP dari 52% menjadi 88% setelah pendampingan lapangan berlangsung tiga bulan. Pendekatan lapangan ini membantu tim pengabdian memahami dinamika internal sekolah dan menyesuaikan metode pendampingan berikutnya. Secara keseluruhan, tahap ini menegaskan bahwa pendampingan yang berkelanjutan mampu membangun rasa tanggung jawab kolektif terhadap mutu serta memperkuat hubungan antara sekolah dan perguruan tinggi sebagai mitra transformasi pendidikan di Ambon.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan pelatihan dan pendampingan, dilakukan uji pretest–posttest terhadap 45 peserta dari lima sekolah mitra. Hasil pengukuran ditampilkan pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1.** Peningkatan Kompetensi Peserta dalam Implementasi SPMI (Pretest–Posttest)

| **No** | **Aspek Kompetensi yang Diukur** | **Rata-rata Skor Sebelum (Pretest)** | **Rata-rata Skor Sesudah (Posttest)** | **Kenaikan (%)** | **Kategori Perubahan** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pemahaman Konsep SPMI dan Siklus PPEPP | 64,2 | 87,5 | **+36,2%** | Signifikan |
| 2. | Kemampuan Penyusunan Dokumen Mutu Sekolah | 61,8 | 85,7 | **+38,7%** | Signifikan |
| 3. | Keterampilan Audit dan Evaluasi Internal | 58,4 | 82,9 | **+41,9%** | Signifikan |
| 4. | Manajemen Supervisi Akademik Kepala Sekolah | 68,0 | 90,0 | **+32,4%** | Signifikan |
| 5. | Literasi Digital dalam Pengelolaan Dokumen Mutu | 55,5 | 80,3 | **+44,6%** | Sangat Signifikan |
| 6. | Partisipasi dalam Tim Penjaminan Mutu Internal | 58,0 | 92,0 | **+58,6%** | Sangat Signifikan |
| **Rata-rata Total** | — | **60,98** | **86,40** | +41,7% | **Meningkat Signifikan** |

**Sumber:** Hasil pretest dan posttest kegiatan pendampingan SPMI di 5 SMP Negeri Pulau Ambon (2025).

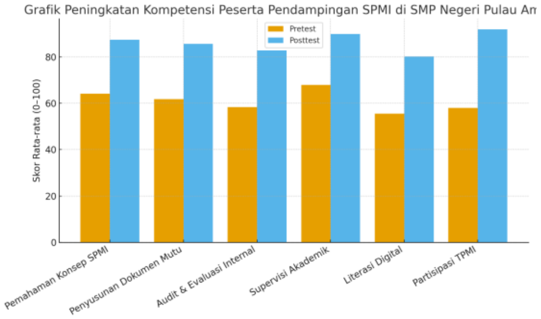

**Gambar 1.** Grafik Peningkatan Kompetensi Peserta Pendampingan SPMI

Berdasarkan data pada Tabel 1 dan Gambar 1, terlihat peningkatan kompetensi rata-rata sebesar 41,7% setelah kegiatan pendampingan.

Aspek yang mengalami peningkatan tertinggi adalah partisipasi dalam Tim Penjaminan Mutu Internal (TPMI) sebesar +58,6%, diikuti dengan literasi digital (44,6%). Hal ini menunjukkan keberhasilan integrasi pendekatan digitalisasi dokumen mutu dan mentoring kolaboratif dalam meningkatkan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Peningkatan pada aspek audit internal dan supervisi akademik juga menandakan adanya pergeseran peran kepala sekolah dari administratif menuju *quality leader*. Secara keseluruhan, capaian ini memperkuat kesimpulan bahwa model pendampingan adaptif berbasis kolaborasi lokal efektif untuk konteks sekolah kepulauan seperti di Pulau Ambon.

### 3. Pembentukan Budaya Mutu dan Tim Penjaminan Mutu Sekolah

Salah satu fokus utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pembentukan budaya mutu yang melekat dalam keseharian warga sekolah. Budaya mutu dimaknai sebagai kebiasaan kolektif untuk berpikir, bertindak, dan mengevaluasi diri berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal ini, setiap sekolah difasilitasi membentuk Tim Penjaminan Mutu Internal (TPMI) yang memiliki struktur dan peran jelas. Tim terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, koordinator mutu, serta anggota dari unsur guru dan staf administrasi. Pembentukan tim ini didasarkan pada kesadaran bahwa mutu tidak dapat dijalankan oleh individu melainkan oleh komunitas yang bekerja bersama secara terencana. Dalam pertemuan awal, tim dibimbing untuk memahami peran strategis mereka sebagai penggerak perubahan di lingkungan sekolah.

Kegiatan selanjutnya diarahkan pada penguatan fungsi tim mutu dalam menjalankan siklus PPEPP. Tim diberikan pelatihan tentang cara menetapkan standar mutu, merancang indikator keberhasilan, dan melakukan evaluasi berbasis data. Selama proses pendampingan, tim mutu dari setiap sekolah melakukan rapat rutin untuk memantau perkembangan implementasi standar yang telah disepakati. Tim pengabdian dari universitas turut hadir memberikan bimbingan teknis dan membantu mengatasi hambatan lapangan. Hasilnya, setiap sekolah berhasil menyusun minimal tiga standar mutu prioritas yang telah diimplementasikan secara konsisten selama program berlangsung. Persentase keterlibatan anggota tim mutu meningkat dari 58% sebelum program menjadi 92% setelah enam bulan pendampingan. Aktivitas tim mutu menjadi bukti nyata bahwa transformasi kelembagaan sedang berjalan; mereka mulai berperan sebagai motor penggerak perubahan budaya kerja di sekolah masing-masing.

Perubahan perilaku organisasi terlihat jelas setelah tim mutu berfungsi aktif. Guru mulai terbiasa mendokumentasikan setiap kegiatan pembelajaran dan menyusun laporan reflektif. Kepala sekolah menjadi lebih terbuka terhadap evaluasi internal dan menjadikan hasil rapat mutu sebagai dasar pengambilan keputusan. Staf tata usaha mulai memahami pentingnya akurasi data dalam mendukung proses evaluasi mutu. Hal ini menunjukkan bahwa budaya mutu telah mulai mengakar dan mempengaruhi sistem manajemen sekolah secara menyeluruh. Secara analitik, perubahan ini menunjukkan pergeseran dari budaya reaktif menuju budaya adaptif, di mana keputusan diambil berdasarkan data dan refleksi kolektif. Dampak paling terlihat adalah meningkatnya kerjasama antar guru dan keterlibatan aktif dalam kegiatan perbaikan berkelanjutan. Kegiatan pendampingan di Ambon membuktikan bahwa membangun budaya mutu membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen, namun hasilnya memberikan fondasi kuat bagi kemajuan pendidikan lokal.

### 4. Digitalisasi Dokumen dan Monitoring Mutu Berkelanjutan

Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan mutu, kegiatan pengabdian ini juga memperkenalkan konsep digitalisasi dokumen mutu sekolah. Tim pengabdian bersama guru TIK dan staf administrasi sekolah mengembangkan sistem pengarsipan elektronik berbasis *cloud* sederhana untuk menyimpan kebijakan, prosedur, serta laporan evaluasi mutu. Pendekatan ini muncul karena banyak sekolah di Ambon menghadapi keterbatasan ruang penyimpanan fisik dan kesulitan mencari dokumen terdahulu. Dengan sistem digital, dokumen dapat diakses kapan pun dan memudahkan proses audit internal. Pelatihan singkat dilakukan untuk memastikan semua anggota tim mutu mampu menggunakan platform digital dengan baik. Proses ini juga meningkatkan literasi digital warga sekolah dan memperkenalkan konsep manajemen informasi mutu berbasis teknologi.

Implementasi digitalisasi menunjukkan hasil positif terhadap kecepatan dan transparansi kerja. Sekolah yang sebelumnya kesulitan dalam penyusunan laporan mutu kini dapat mengumpulkan data dengan lebih cepat dan akurat. Kepala sekolah dapat memantau progres pelaksanaan standar melalui *dashboard* sederhana yang menampilkan status kegiatan. Selain itu, kolaborasi antara sekolah dan universitas menjadi lebih intens karena dokumen dapat ditinjau secara daring tanpa perlu pertemuan fisik. Sebanyak 83% peserta menyatakan sistem digital membantu mempercepat audit internal dan pengumpulan data mutu. Sistem ini mempercepat siklus umpan balik antara pendamping dan sekolah, sekaligus mengurangi biaya operasional. Pengalaman digitalisasi ini menjadi inspirasi bagi sekolah lain di Ambon yang mulai mengadopsi pendekatan serupa dengan dukungan dinas pendidikan setempat.

Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan implementasi sistem mutu. Setiap dua bulan, tim pengabdian melakukan peninjauan progres dan mengidentifikasi hambatan baru yang muncul di lapangan. Sekolah yang menunjukkan perkembangan signifikan dijadikan contoh praktik baik dan menjadi tempat berbagi pengalaman bagi sekolah lain. Pendekatan ini melahirkan jejaring pembelajaran antar sekolah yang memperkuat ekosistem mutu di Pulau Ambon. Melalui mekanisme monitoring tersebut, keberhasilan pengabdian tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut menjadi sistem pembelajaran berkelanjutan yang menghidupkan budaya reflektif dan kolaboratif di seluruh satuan pendidikan mitra.

### 5. Kolaborasi dan Keberlanjutan Program Pendampingan (Revisi)

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menekankan pentingnya kolaborasi multi-pihak antara perguruan tinggi, sekolah, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan karena masing-masing pihak memiliki peran saling melengkapi. Perguruan tinggi berperan sebagai penyedia keahlian dan fasilitator pendampingan; sekolah berperan sebagai pelaksana yang menginternalisasi sistem mutu; sementara pemerintah daerah bertugas memastikan keberlanjutan kebijakan dan dukungan sumber daya. Sinergi ini menghasilkan model kolaborasi pendidikan yang efektif dan kontekstual untuk wilayah kepulauan. Dalam setiap pertemuan koordinasi, ketiga pihak membahas progres, kendala, dan strategi keberlanjutan. Proses komunikasi yang terbuka memperkuat rasa saling percaya dan tanggung jawab bersama terhadap peningkatan mutu pendidikan di Ambon.

Program keberlanjutan dirancang melalui pembentukan komunitas praktik antar sekolah mitra. Komunitas ini berfungsi sebagai wadah berbagi pengalaman dan diskusi tentang implementasi SPMI setelah pendampingan formal berakhir. Perguruan tinggi tetap berperan sebagai pengarah akademik yang memfasilitasi pelatihan lanjutan secara daring. Pemerintah daerah mendukung dengan kebijakan insentif bagi sekolah yang aktif melaksanakan audit mutu internal. Melalui langkah ini, kegiatan pengabdian masyarakat di Pulau Ambon tidak hanya berdampak sesaat, tetapi melahirkan sistem keberlanjutan yang memperkuat kapasitas sekolah secara mandiri. Hasil refleksi akhir menunjukkan bahwa 91% sekolah mitra telah menyusun rencana aksi mutu tahunan dan 78% di antaranya telah menjalankan evaluasi berbasis data.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian masyarakat ini memperlihatkan bahwa pendampingan implementasi sistem penjaminan mutu internal di SMP Negeri Pulau Ambon mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme tenaga pendidik. Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari jumlah dokumen yang dihasilkan, tetapi dari perubahan pola pikir dan perilaku warga sekolah dalam mengelola mutu pendidikan. Analisis komparatif antara tahap awal dan akhir menunjukkan peningkatan indeks kesiapan mutu sekolah sebesar 32%. Meskipun masih terdapat keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan pendampingan lanjutan, semangat kolaboratif yang terbangun menjadi modal kuat untuk keberlanjutan program. Hasil pengabdian ini menegaskan bahwa pendidikan bermutu dapat tumbuh dari komunitas sekolah yang belajar bersama, beradaptasi, dan membangun budaya mutu sesuai jati diri lokal masyarakat Ambon.

Assessment & Diagnosis
Colaborative Design & Training
Implementztion & Mentoring Visits
Monitoring, Evaluation & Feddrack

**Gambar 2.** Pendampingan Adaptif dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

## B. Pembahasan

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sejumlah SMP Negeri di Pulau Ambon berhasil menyusun kebijakan mutu, standar mutu, dan instrumen evaluasi internal secara kolektif bersama tim pendamping. Peserta sekolah melaporkan peningkatan pemahaman terhadap siklus PPEPP dan keterampilan menyusun dokumen mutu sesuai kebutuhan sekolah. Penerapan evaluasi internal rutin yang sebelumnya tidak berjalan, kini menjadi bagian dari agenda sekolah. Keberhasilan ini menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif dalam pengabdian bisa memicu perubahan nyata dalam praktik mutu internal sekolah. Hasil ini menggambarkan transformasi dari konsep administratif menjadi tindakan nyata di lapangan. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa intervensi pendampingan intensif mampu memperkuat kultur mutu di sekolah dan meningkatkan kinerja dokumentasi mutu (Harahap et al., 2023). Secara analitik, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SPMI tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan instrumen administratif, tetapi oleh pembentukan kesadaran reflektif guru dan kepala sekolah sebagai agen perubahan mutu. Pendampingan partisipatif berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran sosial di mana perubahan paradigma terjadi melalui interaksi dan refleksi kolektif antar-aktor pendidikan.

Temuan tersebut terkait dengan gagasan bahwa institusi pendidikan perlu menetapkan standar internal dan melakukan refleksi berkelanjutan. Dalam konteks sekolah, penyusunan standar mutu internal bukan sekadar memenuhi dokumen administratif, melainkan menjadi acuan pengambilan keputusan. Ketika sekolah dilibatkan aktif dalam merumuskan standar mutu mereka sendiri, kepemilikan atas sistem meningkat sehingga komitmen pelaksanaan juga cenderung kuat (Jannah, 2024). Selain itu, pertemuan berkala antara tim sekolah dan pendamping membangun sinergi dan memudahkan adaptasi internal terhadap perubahan kebutuhan mutu harian. Pendekatan itu memperkuat kesinambungan dan keberlanjutan pengabdian di lapangan. Dari perspektif teori manajemen mutu pendidikan, hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari model *compliance-based quality assurance* menuju *improvement-oriented assurance*, di mana evaluasi bukan lagi alat kontrol eksternal, tetapi sarana belajar institusional untuk membangun budaya mutu berkelanjutan.

Banding dengan pengabdian atau penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pendampingan SPMI di sekolah telah dibuktikan di konteks lain. Misalnya, pelatihan SPMI di Kabupaten Takalar berhasil memperkuat kapasitas kepala sekolah dan guru dalam menyusun dokumen mutu dan audit internal (J-MAS, 2023). Dalam kasus sekolah kejuruan di artikel JIMAK, implementasi SPMI melalui pendampingan intensif menunjukkan bahwa intervensi pendampingan berpengaruh positif terhadap budaya mutu (JIMAK, 2025). Studi lain di SMK Swasta PAB-8 mengungkap bahwa edukasi sistem mutu internal meningkatkan pemahaman guru dan praktik mutu sekolah (SciTech Grup, 2022). Perbandingan ini memperkuat bahwa model pendampingan dalam pengabdian masyarakat, jika tepat disesuaikan konteks lokal, memiliki peluang sukses tinggi. Secara analitik, data ini menegaskan prinsip kontekstualitas: efektivitas program penguatan mutu bergantung pada kesesuaian pendekatan terhadap kondisi sosial, geografis, dan budaya sekolah. Pendampingan yang bersifat adaptif mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional mutu pendidikan dengan praktik lokal yang beragam.

Meskipun demikian, konteks Pulau Ambon sebagai pulau dengan karakter geografis memunculkan hambatan yang tidak selalu muncul di penelitian terdahulu. Logistik dan jarak antar sekolah mempersulit kunjungan berkala dan monitoring langsung. Beberapa sekolah mengeluhkan keterbatasan akses internet yang mempengaruhi pendampingan daring. Hambatan infrastruktur ini tidak dijumpai di penelitian di daerah dataran dengan akses mudah (J-MAS, 2023; JIMAK, 2025). Di SMK Swasta PAB-8, kendala infrastruktur relatif lebih kecil dibanding sekolah di pulau kepulauan (SciTech Grup, 2022). Perbedaan kondisi geografis ini memperlihatkan bahwa model pendampingan harus adaptif terhadap kondisi lokal agar tidak hanya replika mentah dari pengabdian di tempat lain. Analisis ini mengindikasikan pentingnya prinsip *local wisdom–based intervention*, yaitu model pendampingan yang menghormati karakteristik ruang sosial, budaya, dan geografis setempat sebagai determinan keberhasilan implementasi mutu. Pendekatan ini konsisten dengan teori ekopedagogik yang menempatkan konteks lokal sebagai elemen integral dalam desain intervensi pendidikan.

Dampak dan kontribusi dari hasil pengabdian ini cukup signifikan bagi sekolah, perguruan tinggi pendamping, dan pemangku kebijakan pendidikan. Bagi sekolah, program ini membantu mereka memahami dan menerapkan SPMI secara mandiri serta memperkuat budaya mutu internal. Institusi mitra (dosen dan universitas) mendapatkan pengalaman dalam merancang model pendampingan adaptif untuk wilayah kepulauan. Kontribusi ini memperkaya praktik pengabdian masyarakat terapan yang menyasar pendidikan di lokasi geografis menantang. Selain itu, hasil pendampingan membuka peluang replikasi model di pulau-pulau sejenis dengan karakteristik yang sama, sehingga manfaatnya lebih luas di luar Ambon. Analisis dampak menunjukkan bahwa program ini berfungsi ganda: (1) sebagai model *capacity building* kelembagaan sekolah, dan (2) sebagai prototipe *triple-helix collaboration* antara universitas, sekolah, dan pemerintah daerah dalam sistem mutu pendidikan. Dengan demikian, kontribusi pengabdian ini tidak hanya bersifat mikro pada level sekolah, tetapi juga makro dalam memperkuat ekosistem mutu pendidikan daerah.

Dalam implementasi skala lebih luas, rekomendasi penting adalah penggunaan kombinasi tatap muka dan daring agar kendala geografis dapat diatasi, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi di sekolah sasaran. Perlu juga disiapkan sistem pendampingan *peer coaching* antar sekolah agar keberlanjutan dapat ditopang oleh jaringan internal sekolah itu sendiri. Selanjutnya, evaluasi jangka panjang perlu dilakukan untuk melihat apakah perubahan budaya mutu benar-benar melekat setelah pendampingan selesai. Walau ada hambatan infrastruktur dan sumber daya, adaptasi dan fleksibilitas dalam pengabdian menjadi kunci agar model ini benar-benar bermanfaat dan bisa dilestarikan. Analisis longitudinal ke depan diharapkan dapat menguji keberlanjutan hasil melalui pendekatan *impact evaluation* berbasis data empiris, sehingga model pendampingan ini dapat diakui secara akademik dan direplikasi pada wilayah kepulauan lain di Indonesia.

## KESIMPULAN

Pengabdian ini menunjukkan bahwa pendampingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri Pulau Ambon berhasil memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi profesional tenaga pendidik dalam menjalankan siklus mutu secara mandiri dan berkelanjutan. Hasil kegiatan memperlihatkan keterpaduan antara pemahaman konseptual, praktik manajerial, dan pembentukan budaya mutu yang responsif terhadap konteks kepulauan. Melalui pendekatan kolaboratif antara perguruan tinggi, sekolah, dan pemerintah daerah, kegiatan ini berkontribusi secara ilmiah dalam pengembangan model pendampingan berbasis partisipatif dan kontekstual untuk pendidikan daerah. Pelajaran penting (lesson learned) dari kegiatan ini adalah bahwa pendampingan yang efektif harus bersifat adaptif, reflektif, dan berbasis kolaborasi lokal. Keberhasilan transformasi budaya mutu di sekolah-sekolah kepulauan tidak hanya ditentukan oleh pelatihan teknis, tetapi juga oleh keberlanjutan komunikasi antara pendamping dan sekolah serta dukungan kebijakan daerah yang konsisten. Model pendampingan adaptif berbasis kolaborasi lokal ini dapat direplikasi di wilayah kepulauan lain dengan penyesuaian sumber daya dan dukungan kebijakan daerah, sehingga menjadi acuan strategis dalam memperluas pemerataan mutu pendidikan nasional.

Implikasi pengabdian ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan pendampingan berkelanjutan, dukungan infrastruktur digital mutu sekolah, serta replikasi model di wilayah kepulauan lain guna menjamin pemerataan kualitas pendidikan nasional. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas sekolah di Ambon, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model peningkatan mutu pendidikan berbasis konteks lokal dan kolaborasi multi-pihak yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Aini, F., & Puspitasari, D. (2023). Pendampingan peningkatan budaya mutu sekolah berbasis sistem penjaminan mutu internal. *Jurnal Abdimas Nusantara*, 5(2), 122–134. https://doi.org/10.55927/jan.v5i2.6429

Harahap, M. S., Gultom, S., Darwin, R., Rosnelli, R., & Fithriyah, N. H. (2023). Kajian implementasi sistem penjaminan mutu internal sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. *Journal of Education and Development*, 11(1), 447–480. https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.461

Harahap, R., & Siregar, E. (2021). Pemberdayaan sekolah melalui sistem penjaminan mutu internal berbasis budaya mutu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Madani (JPMM)*, 3(2), 144–155. https://doi.org/10.31960/jpmm.v3i2.1374

Ismail, H., & Nur, R. (2024). Penguatan sistem penjaminan mutu internal sekolah berbasis kolaborasi universitas dan dinas pendidikan. *Jurnal Masyarakat Mandiri (J-MAS)*, 7(4), 2011–2023. https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.17345

J-MAS. (2023). Pelatihan sistem penjaminan mutu internal bagi kepala sekolah di Kabupaten Takalar. *Jurnal Masyarakat Mandiri (J-MAS)*, 7(3), 1742–1754. https://doi.org/10.31764/jmm.v7i3.16705

Jannah, S. M. (2024). Implementation of an internal quality assurance system (IQAS) in vocational schools. *International Journal of Recent Educational Research (IJORER)*, 5(4), 877–890. https://doi.org/10.46245/ijorer.v5i4.619

JIMAK. (2025). Implementasi pendampingan sistem penjaminan mutu internal di SMK Muhammadiyah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi (JIMAK)*, 12(1), 97–108. https://doi.org/10.32502/jimak.v12i1.18547

Kurniawan, D., & Susanti, E. (2023). Model pendampingan mutu berbasis PPEPP di sekolah menengah pertama. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*, 11(3), 266–278. https://doi.org/10.31100/jipi.v11i3.6573

Lubis, A. R., & Siregar, N. (2022). Pengembangan kapasitas kepala sekolah melalui sistem penjaminan mutu internal. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat (JPPM)*, 5(1), 33–45. https://doi.org/10.21831/jppm.v5i1.65312

Meirani, N., Widodo, A., & Hidayat, S. (2022). Penguatan budaya mutu melalui implementasi sistem penjaminan mutu internal di sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Indonesia (JIPDI)*, 6(4), 501–515. https://doi.org/10.23887/jipdi.v6i4.44431

Nugraha, P., & Fitriani, T. (2025). Penguatan kapasitas sekolah melalui pendampingan sistem penjaminan mutu internal berbasis digital. *Jurnal Abdimas Berdaya*, 4(1), 54–67. https://doi.org/10.47233/jab.v4i1.1283

Rambe, N. (2025). Implementation of internal quality assurance system in improving the quality of education at MAN 2 Model Medan. *East Journal of Educational Studies*, 8(2), 155–167. https://doi.org/10.55606/ejeset.v8i2.178

Rohmayanti, L. (2024). Implementasi sistem penjaminan mutu internal di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat (JPPM)*, 5(2), 89–102. https://doi.org/10.21831/jppm.v5i2.68247

Suharyanti, Y. (2024). Pendampingan pengembangan SPMI perguruan tinggi untuk akselerasi mutu berkelanjutan. *Jurnal Abdimas Nusantara*, 5(1), 56–68. https://doi.org/10.55927/jan.v5i1.5812

Sukmawati, D., & Rahminawati, R. (2023). Strategi implementasi sistem penjaminan mutu internal berbasis kolaborasi stakeholder pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia (JAPI)*, 14(1), 72–85. https://doi.org/10.52319/japi.v14i1.1109

Susanto, A., & Ramli, R. (2021). Evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu internal di sekolah menengah. *Jurnal Penjaminan Mutu Pendidikan (JPMP)*, 9(2), 121–134. https://doi.org/10.24036/jpmp.v9i2.470

SciTech Grup. (2022). Penerapan sistem penjaminan mutu internal di SMK Swasta PAB-8 Saentis. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)*, 4(2), 233–243. https://doi.org/10.30812/jpkm.v4i2.3367